

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.11.2.409208/2019  
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode>Nama Satker : (409208) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : Sofyan  
Bendahara Pengeluaran : Haryanto  
Pejabat Penanda tangan SPM : Sismolo

Halaman : IA . 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		36.466.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		36.466.000
2 Program	013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM		36.466.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya pembangunan hukum dan kebijakan berbasis riset		
Indikator Kinerja Program	01.01	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	20 %	
Output Program	01	Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
Indikator Output Program	01	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	20 %	
Kegiatan	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		36.466.000
Sasaran Kegiatan	01	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
Indikator Kinerja Kegiatan	01.01	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
Sasaran Kegiatan	02	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	02.01	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		
Output Kegiatan	5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1,00 Layanan	36.466.000
	5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1,00 Layanan	36.466.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	33 Rekomendasi	
	02	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	10 Buku	

Jakarta, 5 Desember 2018  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M  
NIP 196611191986031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.11.2.409208/2019  
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode>Nama Satker : (409208) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman I B. 1

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	36.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	36.466.000			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

(Dalam Ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	RpLN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**NOMOR : DIPA-013.11.2.409208/2019**  
**II. RINCIAN PENGELUARAN**  
**(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
 Kode / Nama Satker : (409208) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI  
 Kewenangan : (KD)

Halaman II.1

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409208	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	36.466	-	-	-	36.466		
013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	-	36.466	-	-	-	36.466		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	36.466	-	-	-	36.466		
5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	-	36.466	-	-	-	36.466	20.51	
01	RM	-	36.466	-	-	-	36.466	060	
	<b>J U M L A H</b>	-	36.466	-	-	-	36.466		

Jakarta, 5 Desember 2018  
 Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M  
 NIP 196611191986031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.11.2.409208/2019  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409208) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III.1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409208	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	1.823	1.823	1.823	1.821	36.466
		52 BELANJA BARANG	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	1.823	1.823	1.823	1.821	36.466
	013.11.04.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	1.823	1.823	1.823	1.821	36.466
		52 BELANJA BARANG	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	1.823	1.823	1.823	1.821	36.466

Jakarta, 05 Desember 2018  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M  
NIP 196611191986031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.11.2.409208/2019  
IV. A B L O K I R**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409208) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV A.1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.  
Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M  
NIP 196611191986031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.11.2.409208/2019  
IV. B C A T A N**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409208) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV B.1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018  
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.  
Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M  
NIP 196611191986031001

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : SP DIPA-013.11.2.409208/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (409208) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 36.466.000 ( TIGA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

013.11.04.5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	36.466.000
Rp.	36.466.000

C. Sumber Dana Berasal :

- |                               |     |            |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 36.466.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBPNBPN TA Berjalan       | Rp. | 0          | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
|                               |     |            | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0          | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0          | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |            | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 36.466.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS: 1051-3511-8470-0123

Jakarta, 05 Desember 2018  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001